

LAPORAN PELAKSANAAN
Philanthropy Learning Forum on SDGs
SDGs Sebagai Tools Peningkatan Kapasitas & Pengembangan Kemitraan
di Yogyakarta

PELAKSANAAN

Telah dilaksanakan diskusi dengan tema “**SDGs Sebagai Tools Peningkatan Kapasitas & Pengembangan Kemitraan**” pada :

Hari, tanggal : Selasa, 24 Oktober 2017
Tempat : Ruang Yudhistira, Jogja Expo Center
Jumlah Peserta : 47 orang

PEMBUKAAN

Sesi pembukaan dipandu oleh MC, Niko Shendiasto, yang membuka acara pada pukul 12.45 WIB. Pada saat itu, peserta telah siap untuk mengikuti diskusi dengan telah dibagikan buku panduan SDGs dari Filantropi Indonesia. Acara dimulai dengan berdoa pembukaan bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh MC.

Setelah itu, MC mengundang ibu Erna Witoelar, selaku Pengarah Filantropi Indonesia untuk memberikan sambutan dan secara resmi membuka diskusi.

SAMBUTAN : Ibu Erna Witoelar dari Filantropi Indonesia

“Salam sejahtera, kami dari Filantropi Indonesia, pusatnya ada di Jakarta. Kami berinteraksi dengan berbagai organisasi dan lembaga, tujuan kami di sini adalah untuk belajar dan berbagi mengenai SDGs. Kami juga ingin berbagi informasi mengenai berbagai upaya yang sudah

dan akan diupayakan oleh pemerintah. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Dompot Dhuafa dan Ford Foundation yang telah mensponsori kegiatan kami di berbagai daerah, juga Hoshizora Foundation yang mendukung pelaksanaan di Yogyakarta. Jadi senang sekali kami sudah bisa mulai bekerjasama untuk sesuatu yang tidak mungkin tercapai tanpa kerjasama.

Nanti kita bisa dengar sendiri apa apa SDGs itu atau tujuan pembangunan milenium. Yang kalau dilihat sepintas itu banyak sekali, namun seperti yang kami contohkan di sini bahwa tidak semua lembaga melakukan semua tujuan pembangunann millennium tersebut. Namun, ini suatu saat nanti bisa diperluas, diperdalam, tergantung kepada juga mitra-mitra di daerah yang bersama-sama membangun bersama.

Jadi kami sangat ini daerah jogja ini yang sangat kental aspek budayanya. Pernah saya tahu ada yang namanya Arisan Gambar, unik sekali. Saya dengan telah dikembangkan lagi oleh Dompot Dhuafa. Yang kami alami di FI, bukan hanya menyangkut kedermawanan atau kerelawanan, juga keikhlasan, namun lebih dari itu, yaitu mengenai tata kelola yang baik. Orang tidak ada mempercayakan sumber dayanya kepada kita jika kita tidak bisa memberikan pengelolaan yang baik.

Juga, saya sampaikan bahwa apa yang masuk ke sini itu tidak sepenuhnya, tidak semuanya. Masih banyak informasi yang lain. Nanti akan bisa disampaikan koneksinya, jadi mengenai pembangunan bangsa Indonesia berikut dengan target-targetnya itu sudah disimpan datanya oleh Bappenas. Penerapan SDGs untuk pemerintah daerah, itu juga sudah ada catatannya. Kemudian ada lagi *baseline data*, data dasar melaui program SDGs di seluruh Indonesia. Jadi kita tidak selalu mulai dari nol, jadi ada *baseline* nya. Juga ada beberapa alat—*tools*—yang dipakai oleh pemerintah daerah, kota, dan kabupaten. Adanya program-program dari presiden diharapkan bisa menyentuh *cluster-cluster* di berbagai daerah. Nanti lebih detilnya akan disampaikan oleh Pak Timo.”

PEMAPARAN MATERI

Setelah dibuka oleh sambutan bu Erna, diskusi dipandu oleh Reky Martha sebagai moderator. Dalam diskusi ini, akan diisi materi dari 4 narasumber :

- Timotius Lesmana – Filantropi Indonesia
- Abu Yazid – Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Bappeda DIY
- Maharani Hapsari – dosen Hubungan Internasional UGM
 - Sabeth Abilawa – GM Corporate Secretary Dompot Dhuafa

PEMATERI 1 : Timotius Lesmana (Filantropi Indonesia)

A man in a blue batik shirt is speaking into a microphone at a podium. Behind him is a banner for the "Philantropy Learning Forum on SDGs" with logos for "ASPIK DATA", "Philantropi Indonesia", "KOPHIZORA", and "FORD FOUNDATION". The text on the banner reads "SDGs Sebagai Tools Peningkatan Kapasitas & Pengembangan". To his left, two other people are seated at a table with water bottles and glasses. The background features a large Garuda emblem on the wall and a framed portrait of a man in a suit.

Tujuan dari filantropi, disampaikan oleh Pak Timo, adalah untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Ada banyak masalah di Indonesia dan kita bersama-sama membantu mereka yang kesulitan. Pak Timo berharap bahwa setelah pulang dari acara ini nanti, peserta bisa semakin tanggap dengan gerakan-gerakan filantropi dan mendukungnya.

Berikut adalah penjelasan Timotius Lesamana terkait SDGs :



Berbagi & Bersinergi untuk Pencapaian SDGs

Timotheus Lesmana
Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia
www.filantropi.or.id



Filantropi di Indonesia

- Filantropi ibarat **anggur lama dalam botol baru**: istilah filantropi tergolong baru, tapi praktiknya sudah dilakukan ratusan tahun lalu
- Filantropi bagian dari **AJARAN KEAGAMAAN** dan **TRADISI/ BUDAYA** yang berkaitan dengan KEDERMAWANAN
- Ajaran agama: zakat, infaq, sedekah, kolekte, persepuluhan, punia, darma, dll
- Tradisi masyarakat: Jimpitan, parelek, patungan, buah sulungan, dll



“...berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela yang didorong cinta kasih kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum...”

Perkembangan Filantropi Indonesia

- Tingkat kedermawanan masyarakat tinggi: Indonesia negara paling dermawan nomor 2 di dunia (CAF World Giving Index 2017)
- Potensi sumbangan sangat besar
- Pendayagunaan sumbangan meluas: anti korupsi, lingkungan, pemberdayaan perempuan, dll
- Munculnya skema-skema baru dalam penggalangan dana: crowdfunding dari perusahaan (cause related marketing, buy one give one, click and donate, dll)
- Penggunaan metode baru yang lebih modern dalam memobilisasi sumber daya (SMS, email, RBT, e-banking, Crowdfunding dll)
- Meningkatkan peran generasi milenial yang mengubah pola filantropi menjadi lebih atraktif, berbasis komunitas, digitalized, dan memanfaatkan seni budaya



Tantangan Filantropi

- Direct giving
- No name
- Tidak kritis
- Belum berorientasi jangka panjang
- Transparansi dan akuntabilitas
- Minim data
- Kebijakan yang belum mendukung



- Indonesia masuk sebagai Negara paling dermawan kedua di seluruh dunia. Menunjukkan bahwa kita punya bakat kedermawanan. Melalui lembaga penelitian kami, bahwa setiap warga Indonesia setiap bulannya secara tidak sadar menyumbangkan sebanyak 325.000 rupiah, baik dengan membantu teman dan sebagainya.
- Kedermawanan ini didukung oleh filantropi keagamaan yang ada di Indonesia. Dari angka ini tentu terlihat sangat besar.
- Dalam perkembangan ke depan, akan banyak kegiatan-kegiatan filantropi yang akan bergerak ke bidang-bidang seperti anti korupsi.
- Mulai bermunculan metode-metode baru dalam berbagai, seperti misalnya *crowd funding*. Bahkan sekarang Filantropi sedang semakin mendorong bagaimana kita sekarang harus semakin banyak tangan di atas daripada tangan yang di bawah. Semangat ini harus selalu ditumbuhkan.
- Tangan di atas, atau *giving* tersebut juga bagaimana caranya agar tidak sekedar *giving* namun juga bisa memberi dampak yang jelas.
- Memberikan harus bisa membuat orang lain berdaya. Orang yang diberi tidak boleh menjadi bergantung, namun harus bisa berdaya dalam hidupnya.
- Namun ada beberapa tantangan, bahwa masih ada yang namanya *direct giving*, ke depan kita tidak ingin ini terjadi.
- Semua bantuan yang kita berikan harus bisa memberikan dampak kepada orang lain. Kita tidak ingin mereka 3 tahun lagi masih menerima bantuan, mereka harus bisa menjadi berdaya karena ditolong.

- Sumbangan tanpa nama membuat lembaga filantropi tidak memiliki data untuk memetakan identitas dan latar belakang donatur, karena kita ingin menyasar dampaknya.
- Menjadi dermawan juga harus kritis, apakah bantuan yang saya lakukan ini memberikan dampak baik apa tidak. Tidak boleh jika membantu hanya memberikan saja, kita harus mampu memahami apa dampak jangka panjang dari bantuan kita.
- Transparansi organisasi filantropis masih menjadi catatan. Seharusnya transparansi menjadi semangat dari lembaga-lembaga filantropis.
- Indonesia sedang memperbaharui Undang-Undang Pengumpulan Uang atau *crowd funding*. UU yang kita miliki dibuat pada tahun 1961, jadi tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini, dimana sekarang pengumpulan dana bisa melalui online.



SDGs/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- SDGs atau Tujuan Pembangunan berkelanjutan adalah seperangkat tujuan pembangunan global berikut target dan indikator yang disepakati sebagai tujuan bersama oleh seluruh negara anggota PBB
- SDGs merupakan kelanjutan dari pelaksanaan MDGs (selesai tahun 2015) dan disepakati sebagai tujuan pembangunan global sampai 2030.
- Tujuan SDGs: **Pembangunan yang menjaga: peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat; keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup; serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.**

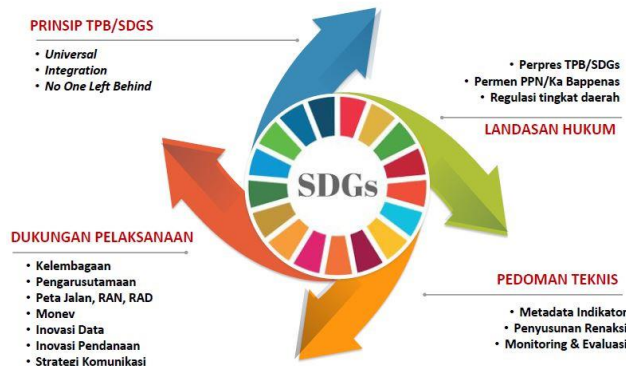


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
17 GOALS TO TRANSFORM OUR WORLD

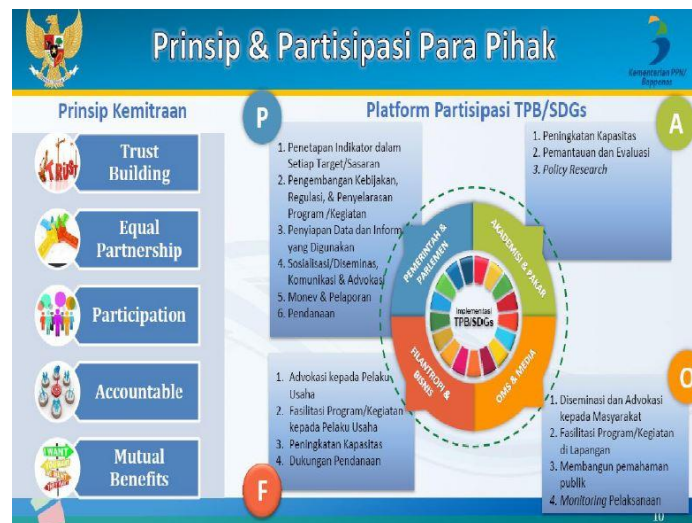
GOAL, TARGET & INDIKATOR SDGs/TPB/



KERANGKA PELAKSANAAN



- Filantropi dalam perjalanannya, terutama setelah 2015, sebelum tujuan Pembangunan Berkelanjutan kita sudah mulai. Cara yang dilakukan salah satunya adalah dengan mendukung diskusi-diskusi yang berhubungan dengan kegiatan filantropi.
- Di dalam SDGs ada 17 Goals, dan targetnya ada 169 target, dengan indicator 241 indikator. Semua ini disepakati oleh hampir 186 negara, ini menjadi tujuan pembangunan yang dilakukan bersama-sama.
- Tujuan SDGs adalah meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat, berkelanjutan pembangunannya, meningkat kualitas hidupnya.
- Semua target dan indicator dalam diagram inilah yang harus kita galakkan untuk dilaksanakan bersama.
- Prinsip yang paling penting adalah Universal, harus berintergrasi, dan yang utama adalah *no one left behind*.
- Di SDGs, tidak ada satupun yang boleh ditinggalkan atau tidak dilibatkan. Salah satu tugas kita adalah hari ini mengajak semua peserta untuk ikut menjalankan SDGs.
- Perlu kita pahami bahwa SDGs adalah untuk semua, sudah tugas dan tanggungjawab kita untuk melaksanakan SDGs sesuai target-target tadi.



- Prinsip yang akan dikembangkan di sini berhubungan dengan Filantropi Indonesia goal 2017 dimana kemitraan harus dibangun, maka kita punya Prinsip Kemitraan.
 - 1) Trust : bagaimana semua yang terlibat dalam program filantropi membangun prinsip saling percaya, sehingga mendorong tercapainya tujuan pembangunan.

- 2) Equal : dalam melakukan kemitraan kita harus sama, tidak ada yang di atas, atau yang di bawah.
 - 3) Partisipasi Semua Pihak
 - 4) Accountable : harus memiliki semangat yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak seenaknya.
 - 5) Mutual Benefit : semua harus saling mendapatkan manfaatnya, tidak boleh hanya satu pihak saja.
- Dalam implementasi SDGs ada 4 platform : Pemerintah, akademisi dan pakar, NGO & media, pelaku bisnis dan filantropi.
 - Hari ini yang dilakukan adalah memberikan fasilitas dan menjelaskan mengenai SDGs kepada kita semua.



SDG Philanthropy Platform

- Suatu platform yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog dan kolaborasi antar lembaga/aktivitas filantropi untuk terlibat dalam proses dan tujuan pembangunan global.
- Dimulai di beberapa negara percontohan, yakni Ghana, Indonesia, Kenya dan Kolombia
- Platform ini juga akan membantu pemerintah dan PBB dalam memahami nilai tambah dari keterlibatan langsung lembaga-lembaga filantropi
- Memfasilitasi upaya berbagi informasi, capacity building, kolaborasi dan membawa inisiatif ke level kemitraan global
- Mitra utama SDG Philanthropy Platform di Indonesia adalah Perhimpunan Filantropi Indonesia




Mengapa Perlu Berpartisipasi dalam Pencapaian SDGs ?

- SDGs menyediakan narasi bersama tentang Pembangunan Berkelanjutan
- SDGs membantu memandu pemahaman masyarakat mengenai kompleksitas masalah Pembangunan Berkelanjutan
- SDGs bisa menyatukan masyarakat global dan memobilisasi pemangku kepentingan terkait pembangunan berkelanjutan
- Mengukur kemajuan dengan memastikan penggunaan metrik yang seragam
- Menyejajarkan kerja dan aksi pada kelompok aktor yang memiliki kesenjangan
- Berbagi pembelajaran dan keahlian serta mempromosikan praktik-praktik terbaik
- Memberi perhatian pada masalah dan tantangan yang belum diselesaikan • Memobilisasi peningkatan dukungan publik dan sumber finansial untuk perubahan
- Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas terhadap dampak kerja sosial
- mengukur kemajuan dengan memastikan penggunaan metrik yang seragam SDGs bisa mempromosikan inovasi dan memperkuat kolaborasi
- Mendukung pendekatan jangka panjang



Keuntungan Berpartisipasi dalam Pencapaian SDGs ?

- Meningkatkan kapasitas organisasi
- Mensinergikan program dan agenda organisasi dengan agenda pembangunan nasional dan global
- Mengukur dampak dan kontribusi program
- Menjadi tools fundraising dan kemitraan
- Kesempatan untuk mempromosikan program dan inisiatif ke level nasional dan global
- Kesempatan untuk bermitra dan bersinergi dengan organisasi/lembaga lain di level nasional dan global




Salah Kaprah terhadap SDGs

- SDGs adalah agenda asing/global yang tak ada kaitan dengan kepentingan Indonesia
- SDGs adalah program PBB
- Mendukung dan berpartisipasi dalam pencapaian SDGs berarti membuat program baru
- Mendukung dan berpartisipasi dalam pencapaian SDGs butuh tambahan dana/sumber daya baru
- Mendukung dan berpartisipasi dalam pencapaian SDGs berarti mendukung dan terlibat dalam semua tujuan SDGs
- Tak ada manfaat yang bisa didapat dari keterlibatan dalam pencapaian SDGs



- Kita juga memiliki SDGs Philanthropy Platform.
- Saat ini kita sudah termasuk 6 negara yang terlibat dalam SDGs Philanthropy Platform.

- Pertama kali dinisiasi oleh UNDP, tujuannya adalah memfasilitasi lembaga-lembaga filantropi dengan sesama lembaga filantropis di dunia untuk bersama mencapai tujuan yang dicita-citakan dalam SDGs.
- Indonesia menjadi salah satu rules dari 4 negara awal yang terlibat, ada Kenya, Colombia, dan ada Indonesia.
- Di Indonesia, Filantropi Indonesia selalu menjadi mitra untuk mengembangkan SDGs Philanthropy Platform. Kemitraan ini menjadi jalan bagi kita untuk menyambung, jejaring kami dengan pihak global.





**MEKANISME KERJA
FBI 4 SDGs**

**FILANTROPI DAN BISNIS
SDGs for Better Indonesia**

Pembentukan *Working Group* menjadi 6 Kelompok Kerja:

- *WG Tools* (mendalami instrumen yang sudah ada)
- *WG Best Practices* (menghimpun praktek cerdas yg ada)
- *WG Deepening Engagement* (Perdalam & Perluas Kemitraan)
- *WG Emerging/Promoting* (sosialisasi SDGs ke anggota2)
- *WG Localizing* (promosi & aksi bersama di tingkat lokal)
- *WG Advocacy & Regulations* (advokasi bersama)

Setiap organisasi dapat ikut dalam pokja yg diinginkan & tiap pokja difasilitasi oleh *co-chairs* yg dipilih bersama.

- Di Indonesia, penerapan SDGs Philanthropy Platform ini tergabung dalam Filantropi dan Bisnis Indonesia (FBI) 4 SDGs, saat ini sudah ada 15 forum terlibat, dimana total anggota yang terlibat ada 1500. Ini merupakan hasil kerja keras kita bersama-sama dalam mewujudkan SDGs.
- Dalam mewujudkannya kita bagi dalam 6 Working Group (WG) :
 - 1) WG Tools : bagaimana metode yang baik dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia
 - 2) WG Best Practice : kita mencari apa yang sudah dilakukan, jadi tidak perlu mengulang-ulang yang sudah dilakukan oleh teman-teman.
 - 3) WG Deepening & Engagement : memperdalam poin 1 & 2 bisa menyambung.
 - 4) WG Emerging / Promoting : sosialisasi kerja baik pada semua pihak
 - 5) WG Localizing : kami meyakini bahwa SDGs tidak akan berjalan jika tidak melibatkan pemerintah local, tidak bisa jika hanya dilakukan oleh pemerintah daerah.
 - 6) WG Advocacy & Regulations

Zakat On SDGs



- Kemitraan untuk optimalisasi peran dan kontribusi zakat untuk mendukung pembangunan nasional melalui pencapaian SDGs
- Tujuan dan target: Goal 1 (tanpa kemiskinan) Goal 2 (tanpa kelaparan) Goal 3 (Kehidupan yang sehat dan sejahtera), Goal 4 (Pendidikan berkualitas), Goal 8 (Pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi) dan Goal 6 (Air Bersih & Sanitasi Layak)
- Diinisiasi BAZNAS dan Filantropi Indonesia serta akan diperluas dengan melibatkan LAZNAS dan para pihak yang menjadi mitranya (perusahaan, pemerintah, OMS/komunitas)
- Dilakukan di wilayah kerja BAZNAS dan LAZNAS
- Tahapan program: 1) Perumusan Program; 2) MoU; 3) Sosialisasi; 4) Penyusunan fikh Zakat on SDGs; 5) Perluasan mitra; 5) Penyusunan rencana aksi; 5) Peningkatan kapasitas; 6) Implementasi program; 7) Monev



Klaster Filantropi Perkotaan (Goal 11 SDGs)



- Kemitraan multisektor untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan
- Tujuan dan target: Goal 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan) dan
- Pendekatan Program: GERAKAN 100-0-100
 - > Mencapai akses air minum 100%
 - > Mengurangi kawasan kumuh hingga 0%
 - > Menyediakan akses sanitasi layak 100%
- Dilakukan di 6 Kota (Malang, Bogor, Banjarmasin, Palu, Banda Aceh, Mataram)
- Melibatkan Filantropi, bisnis, Pemerintah pusat (Kementerian PUPR), Pemda dan OMS/Komunitas
- Tahapan program: 1) Need Assessment; 2) Pembangunan kemitraan; 3) Sosialisasi dan sinkronisasi dengan program Pemerintah/Pemda; 4) Implementasi; 5) Monev

PEMATERI 2 : Abu Yazid (Bappeda DIY)



Untuk memahami bagaimana pelaksanaan SDGs di Yogyakarta, Bapak Abu Yazid selaku Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial memberikan gambaran tentang permasalahan atau tantangan yang dihadapi pemerintah.

Berikut adalah penjelasan Bapak Abu Yazid tentang pelaksanaan dan tantangan SDGs di Provinsi Yogyakarta :



PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DIY
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
BAPPEDA DIY

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN WILAYAH

TINGKAT KEMISKINAN
13,34 %

GINI RASIO DIY
0,425 (2017)
NASIONAL 0,394

Jumlah Penduduk Miskin di DIY 2011 – 2016
(dalam ribuan) :



Tingkat Kemiskinan di DIY 2011 – 2016



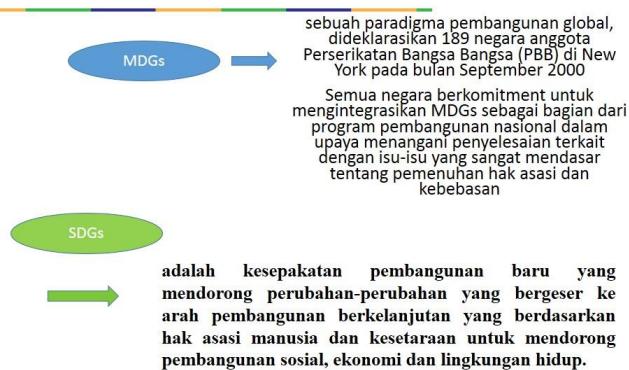
- Potret kemiskinan di Yogyakarta banyak mendapatkan perhatian karena tingkat kemiskinan di DIY sendiri masih sekitar 13.3—masih berada di bawah rata-rata nasional.
- Hal ini disebabkan adanya ketimpangan antara di desa dan di kota.
- Dengan kondisi tersebut, penurunannya hanya sekitar 0,4 /tahunnya
- Namun pada tahun 2015-2016 ada penurunan hampir 1,5%, hal ini dikarenakan saat itu pemerintah menggelirkan bantuan kepada masyarakat tidak mampu di berbagai wilayah di DIY.
- Namun ternyata warga di DIY ini juga memiliki tingkat kebahagiaan warga yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa warga DIY meskipun belum mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tetapi cukup bahagia dan puas dengan keadaan di sekitarnya.
- Penjelasan dari hal ini adalah relative rendahnya kebutuhan kalori yang dikonsumsi warga di DIY. Misalnya masyarakat di Gunung Kidul mereka yang terbiasa makan 2 kali dalam sehari sudah cukup, tidak bisa dikatakan tidak bahagia karena mereka belum tentu bersedia makan 3 kali sehari.
- Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kandungan sumber daya alam di DIY.
- Perbedaan demografis, adanya perbedaan kondisi ini juga menyebabkan perbedaan yang mencolok antar wilayah di DIY (pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan)
- Belum tepatnya alokasi bantuan dari pemerintah ke masyarakat.
- Permasalahan tersebut diselesaikan dengan dibangunnya kantor untuk kemiskinan.



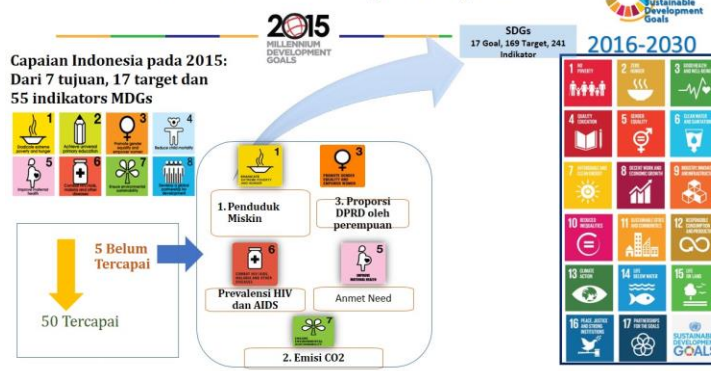


- Upaya pengembangan ekonomi yang akan dilakukan tersebar dalam 8 wilayah : Menoreh, Samas-Parangtritis, Perkotaan-Prambanan, Nglanggeran, Bandara dan sekitarnya, Sentolo-Kalasan.
- Dengan adanya bandara baru, nanti akan dibangun jalan untuk mempermudah akses ke berbagai daerah di pinggir selatan DIY.

1. Sekilas tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)



Dari MDGs Menuju TPB/SDGs



- Dilihat dari sasaran dan target SDGs di Indonesia, ada 5 yang belum tercapai di DIY
 - 1) Pengentasan Kemiskinan
 - 2) Gender : Proporsi DPDR oleh perempuan
 - 3) Prevalensi HIV/Aids

Pemerintah kesulitan dalam mengumpulkan data akurat berapa jumlah orang DIY yang terinvestasi, mengingat banyaknya pendatang di DIY.

 - 4) Anmet Need

Belum berjalannya program Keluarga Berencana yang menyebabkan ledakan jumlah penduduk terjadi di DIY

 - 5) Emisi CO2

TPB/SDGs Untuk Menyempurnakan MDGs

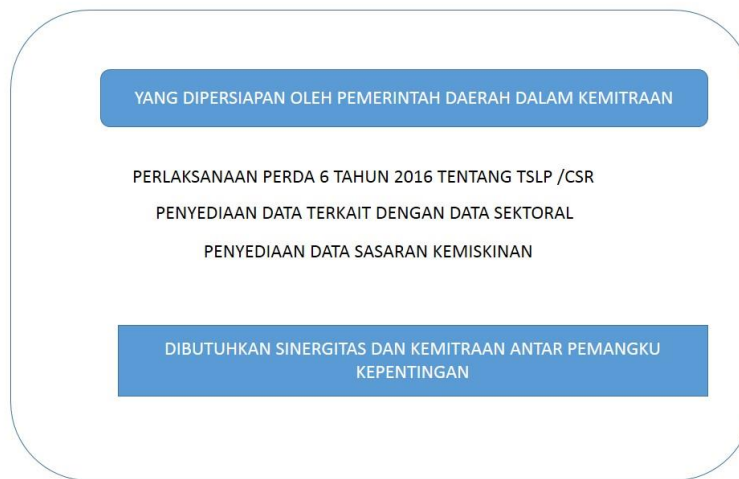


- Dalam menjalankan program SDGs ini, pemerintah menyadari bahwa tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu pemerintah menggandeng berbagai macam pihak untuk ikut terlibat dalam gerakan ini.
- Sebelum adanya SDGs, pemerintah telah melakukan program-program yang sejalan dengan SDGs. Sejak 2016 sudah berjalan, namun belum mampu menentukan indikator-indikatornya.
- Tantangan kami adalah menyelesaikan pekerjaan yang belum dituntaskan, bersamaan dengan RAD.
- Melihat SDGs sebagai perluasan dan memperdalam MDGs, dari pemerintah berharap semoga semakin bisa membantu dalam menentukan indikator-indikator.

5

Prinsip dan Partisipasi Para Pihak





- Dalam penerapan SDGs, DIY sudah memiliki peraturan Gubernur.
- Perda nomor 6 tahun 2016 mengatur tentang CSR di Yogyakarta.
- Tantangan dari pemerintah adalah kesulitan dalam mendata jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membangun DIY. Pelaku bisnis hanya memberikan data program-program tanpa benar-benar bisa memaparkan berapa jumlah uang yang dimiliki untuk CSR
- Oleh karena itu, dengan pelaksanaan Perda no.6 dicoba untuk menyatukan langkah pengusaha-pengusaha pelaku bisnis CSR untuk bersama-sama menyusun program kegiatan yang selaras dengan kegiatan Pemerintahan Daerah
- Caranya adalah pemerintah DIY menyediakan database, kemudian pihak pelaku CSR akan memetakan kemana mereka akan mengalokasikan berdasarkan data yang dimiliki pemerintah.
- Pemerintah akan membuat Forum CSR Provinsi DIY, tugasnya adalah memandu jalannya program-program CSR di provinsi agar terintegrasi.



- Dibutuhkan sinergi dan kemitraan antar pemangku kepentingan.
- Pemerintah daerah akan menyediakan data, sedangkan pelaksanaan di lapangan akan dilakukan oleh para pemangku kepentingan di CSR.
- Bentuk kemitraan yang sudah dilakukan, yaitu intervensi sasaran. Seperti pengentasan kemiskinan, karena yang mereka butuhkan adalah data untuk melakukan program. CSR akan melakukan intervensi dengan program pendampingan sampai evaluasi program.
- Salah satunya adalah pelaksanaan program cuci tangan, dan program sapi perah yang sudah berhasil dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku CSR.

PEMATERI 3 : Maharani Hapsari (Dosen UGM)

Pembicaraan mengenai filantropi dengan SDGs di level global sangat meningkat. Pembangunan inklusif adalah salah satu inti yang ada apabila kita membicarakan mengenai SDGs.

Pembangunan ini berkebalikan dengan pembangunan eksklusif. Inti dari pembangunan inklusif adalah target dari pembangunan itu sendiri yang dapat mengakses kelompok yang paling termarginalkan. Apabila kita berbicara mengenai kelompok yang termarginalkan ini, faktanya mereka tidak teridentifikasi oleh statistik. Hal ini menjadi salah satu persoalan bahwa ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menemukan siapa saja yang harus dibantu.



Berikut adalah penjelasan Maharani Hapsari dalam SDGs :

Filantropi, Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pembangunan Inklusif

Maharani Hapsari (ranihps@ugm.ac.id)
PROGRAM ON HUMANITARIAN ACTION (POHA)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UGM

Presentasi di Philantrophy Learning Forum on SDGs
Yogyakarta, 24 Oktober 2017

Mengapa aktivisme filantropi relevan dengan SDGs?

- Kemiskinan sebagai problematika kompleks dan hirarkis
- Sumber daya pembangunan tidak menjangkau mereka-mereka di posisi ekstrim dalam rantai kemiskinan (akar rumput dan kelompok marjinal)

- Filantropi bukan hanya berbicara mengenai pemberian bantuan, namun juga pertanggungjawaban atas bantuan yang diberikan tersebut. Kita harus paham siapa yang diberi bantuan dan dampak dari bantuan tersebut.
- Filantropi dan SDGs sendiri bukanlah hal yang baru, namun hanya *framing*-nya saja yang berubah. SDGs lebih berpotensi. Kita berbicara kemiskinan sebagai sebuah problematika yang kompleks dan hirarkis. Persoalannya adalah kebijakan tidak berjalan di posisi mereka yang sangat ekstrem.
- Jadi kita sedang mempertemukan pihak-pihak yang berada di posisi paling ekstrem ini supaya bertemu di tengah. Fakta di Yogyakarta dan di kota-kota lain di Indonesia, apabila kita berbicara mengenai kelompok marjinal, yang muncul adalah perspektif kita memberi label. Kelompok yang tidak kita bantu dikatakan sebagai kelompok marjinal, padahal kalau kita berbicara pembangunan, ini soal *policy*, pengambil keputusan.
- Jadi ada satu paradigma yang harus dibongkar yaitu ketika kita memberikan bantuan, harus ada yang di atas dan harus ada yang di bawah. Paradigma ini harus dirubah dan mulai ditanamkan bahwa kita setara. Ini adalah tantangan apabila kita berbicara mengenai filantropi.
- Sebagai akademisi, inti dari pembahasan filantropi melalui SDGs adalah mengenai transisi pembangunan. Filantropi ini ada di bagian yang mengkritisi orientasi pembangunan dan membawa alternatif.



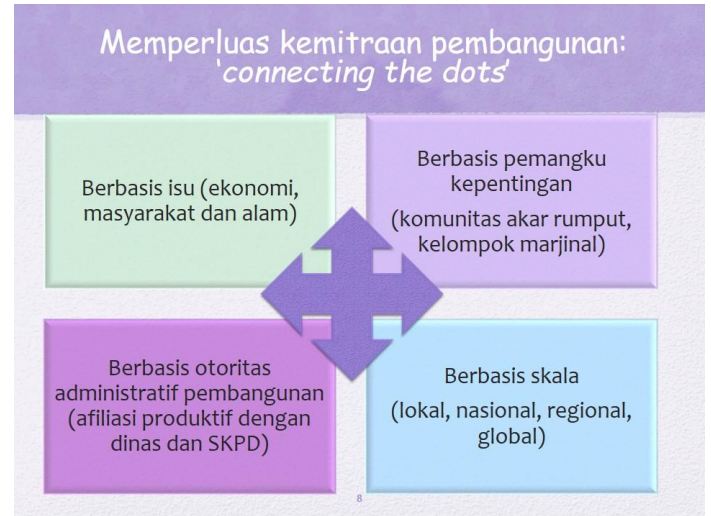
- Selanjutnya, pembangunan tersebut dilihat sebagai emansipasi. Pertumbuhan itu adalah sarana saja ketimbang tujuan itu sendiri. Hal ini telah diterapkan dengan baik oleh pemerintah baik di taraf nasional, daerah, bahkan sampai ke desa. Konsep pemberdayaan yang berjalan dengan baik ini layak dipertahankan.
- Wacana pembangunan dapat digeser ke wacana emansipasi dengan menggunakan pemerataan. Biasanya ketika ada pembangunan, distirbusinya akan tidak rata sehingga menciptakan kesenjangan. Sehingga logikanya ketika kita melihat ada kesenjangan di situ, aspek-aspek emansipasi yang muncul adalah untuk bicara tentang pemerataan.
- Dahulu kita fokus ke arah akumulasi, kini kita fokus ke arah redistribusi.

- Ada situasi ketika pemerintah, LSM, maupun Filantropi Indonesia menemukan seseorang layak untuk dibantu namun bingung akan memberikan bantuan melalui siapa diantara ketiganya. Oleh karena itu jangan asal memberikan bantuan tanpa tahu karakteristiknya. Statistik pemerintah itu jadi *baseline* yang sangat penting karena skalanya pasif.
- Di luar statistik pemerintah, ada pula tempat lain untuk mendapatkan data ini yaitu data dari sektor masyarakat sipil. Data seperti ini biasanya tidak terlalu *general*, namun bisa mendalam eksplorasinya atau data tersebut berada di level yang cukup mikro. Ini adalah *cross-check* yang sangat penting.
- Di dalam filantropi zaman sekarang, kita perlu memikirkan mengenai pengelolaan pengetahuannya. Hal tersebut berarti *stakeholders*-nya seperti apa harus dikelola datanya juga. Oleh karena itu kita mampu memetakan daerah yang sudah ter-cover dan mana yang belum.
- Keempat, kita bicara mengenai pemberdayaan di level agensi. Seperti yang telah disampaikan di awal, kelompok yang kita duga sebagai kelompok marginal, sebetulnya tidak sepenuhnya marjinal. Mereka sudah pasti pernah mendapatkan pemberdayaan. Persoalan yang kemudian muncul adalah koneksi kepada sumber daya yang menunjang untuk diberikan sebagai bantuan masih sangat minim. Di kelompok-kelompok tertentu, kapasitas untuk mengumpulkan data-data terkait kondisi mereka sangat minim sehingga data itu selalu berasal dari luar atau dengan kata lain tidak dapat menggambarkan kondisinya sendiri.



- Filantropi Indonesia ke depannya akan bergerak di skala besar atau kecil, itu adalah pilihan. Hal yang perlu diperhatikan adalah *scope*.
- Kemudian filantropi itu soal intervensi atau pemberdayaan? Apabila intervensi sifatnya *top-down* tapi kalau pemberdayaan ada upaya untuk melihat persoalan itu dari perspektif yang berseberangan. Dialog menjadi salah satu hal yang penting untuk mendukung perubahan dari sifat intervensi menjadi pemberdayaan.
- Ketiga, filantropi dilakukan dalam jangka pendek atau panjang. Oleh karena itu kita harus berpikir apakah bantuan yang diberikan memberi dampak di masa mendatang atau tidak.

- Saya ingin mengajak semua yang ada di sini untuk menghubungkan antara kegiatan filantropi ini dengan kerangka tiga lingkaran. Tiga lingkaran tersebut berbicara mengenai *citizen*.
- Filantropi sebetulnya berpotensi menjadi bentuk *citizenship* yang baru, kekeluargaan. Kekeluargaan bukan hanya soal KTP, namun setiap dari kita punya klaim atas barang publik.



Konsepsi filantropi yang *beyond charity* menjadi penting ketika kita bisa memberikan

1. **Pengakuan hak atas pembangunan.** Bantuan itu bisa membuat kelompok yang dibantu mendapatkan pengakuan hak atas pembangunannya. Misalnya hak pengelolaan air minum berbasis komunitas yang sudah banyak muncul di daerah-daerah. Di sini terlihat bahwa hak diakui secara kolektif.
 2. **Hak atas redistribusi sumber daya pembangunan.** Kelompok yang berdaya adalah kelompok yang sejak awal kegiatannya bukan hanya bicara soal akulturasi namun juga redistribusinya.
 3. **Redistribusi dalam pembuatan menyangkut hajat hidup.** Inkulturasi dalam pembuatan keputusan mengatur harkat hidup. Hal ini merupakan persoalan mengenai suara-suara yang dihitung dan suara-suara yang tidak dihitung. Di dalam istilah SDGs, kita mengenalnya sebagai *no one left behind*.
- Berbicara mengenai *beyond charity*, kita bukan hanya berbicara mengenai amal, namun juga konsepsi kewargaan itu fokusnya di dua hal yaitu **sumber daya material** dan **pengetahuan**.
 - Patut kita duga bahwa jangan-jangan masyarakat bukan miskin material, namun miskin pengetahuan. Hal ini dikarenakan apabila seseorang mampu mengakses informasi, dia pasti bisa melakukan sesuatu.
 - Tindakan berikutnya dijalankan berdasarkan informasi yang didapatkan. Jadi proses sirkularnya adalah sumber daya material berpotensi harus dipikirkan bagaimana mengaksesnya dengan berbagai macam cara.

Perluasan Platform



Platform Isu: Ekonomi, Masyarakat, dan Alam



- Memperluas kemitraan pembangunan dibutuhkan usaha untuk *collecting the dots*. Hal ini dikarenakan sudah ada banyak aktivitas, namun banyak hambatan mengenai bagaimana berhubungan satu sama lain.
- Hal terpenting yang harus dipikirkan adalah organisasi aktivitas filantropi yang didasarkan pada isu, *stakeholder*, atau skala. Jadi akan selalu ada banyak kombinasi kerja sama yang didapatkan.
- Ada 3 *platform* isu dalam filantropi yaitu **ekonomi**, **masyarakat**, dan **alam**. Ekonomi sendiri berfungsi apabila ada *trust* dan memiliki *limit*. Ada pula versi 4 *platform* di mana salah satunya adalah tata kelola.
- *Platform-platform* yang ada dapat diperluas dengan mengidentifikasi satu sama lain.
- Dari identifikasi tersebut dapat disusun strategi kerja dan membangun jejaring filantropi.

PEMATERI 4 : Sabeth Abilawa (Dompot Dhuafa)



Hingga hari ini Dompot Dhuafa masih tercatat sebagai lembaga amir zakat di kementerian. Oleh karena itu basisnya memang organisasi Islam yang masih menggali dana dari masyarakat terutama zakat, infaq, dan sedekah. Ada beberapa hal yang menjadi inti dalam pembicaraan sesi ini:



Keywords

- Kebebasan berserikat bagi masyarakat.
- Potensi Dana Publik dan kedermawanan masyarakat Indonesia.
- Sumber daya tidak selalu terkait dengan uang.
- Indonesia unggul dalam kekuatan Civil Society.
- Sentralisasi kekuatan hanya di tangan pemerintah berarti mengingkari kenyataan sosial negeri ini.
- Too much problems need many actors to solve it
- Peran Diplomasi Kemanusiaan.

1. Kebebasan Berserikat

Ini adalah pondasi dasar dari sebuah organisasi filantropi. Jika sebuah organisasi filantropi tidak bisa menunjukkan kemandiriannya, maka peran dia dalam penuntasan tujuan-tujuan SDGs itu juga akan terhambat.

2. Potensi Dana Publik dan Kedermawananan Masyarakat Indonesia

Indonesia termasuk dalam Negara-negara penderma. Potensi zakat di Indonesia tercatat sekitar 267 triliun dan hari ini yang tercatat di lembaga-lembaga zakat (300 milik publik dan 400-an milik pemerintah) baru sekitar 5 triliun.

3. Sumber Daya tidak terkait dengan uang

Uang bukanlah segalanya. Ada mobilisasi yang bisa dilakukan terkait sumber daya manusia. Jadi manusia-manusia yang punya jiwa *volunteerism*, belum dimobilisasi dengan optimal di Indonesia karena mungkin sifat-sifat gotong royong dan sebagainya yang mulai luntur.

4. Indonesia unggul dalam *civil society*

Menurut Dompét Dhuafa, agama yang tidak dimobilisasi secara khusus oleh negara sangat menguntungkan pertumbuhan Islamic society maupun civil society secara umum.

5. Sentralisasi kekuatan hanya di tangan pemerintah

Ketika kita berbicara mengenai filantropi, inisiatif masyarakat untuk ikut menyelesaikan berbagai permasalahan social masyarakat (kemiskinan, ketimpangan, dan sebagainya), kalau tidak dilakukan oleh masyarakat sendiri dan hanya bergantung pada pemerintah, maka di Indonesia ini akan sulit. Contoh, pemerintah membuat undang-undang zakat tahun 2011 nomor 23. Undang-undang tersebut sempat kami (Dompét Dhuafa) gugat di tahun 2012 karena mengingkari kenyataan sosial di masyarakat karena filantropi sudah berkembang dan mengakar sebelum republik ini berdiri.

6. *Too much problem need many actors to solve it*

Ada terlalu banyak masalah di Negara ini, namun muncul simplifikasi bahwa masalah-masalah tersebut hanya dapat diselesaikan oleh satu orang saja. Ketujuh belas dimensi SDGs itu apabila tanpa bantuan *civil society* dan *private sector* akan mustahil diselesaikan.

7. Peran diplomasi kemanusiaan

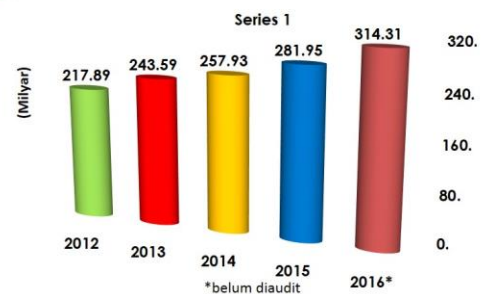
Ketika krisis Rohingya terjadi, pemerintah sangat baik mengakomodir kekuatan *civil society* Negara kita dan kemudian bisa mengumpulkan sinergi di dalam kekuatan donasi masyarakat, menteri luar negeri bisa memberikan advokasi ke Muslim Rohingya, bantuan uang datang dari masyarakat melalui lembaga social, pemerintah menjalankan fungsinya untuk diplomasi kemanusiaan dengan Pemerintah Myanmar, dan hanya Indonesia saja yang diterima, bukan Malaysia, bukan Belanda. Hal ini karena *soft diplomacy* yang dilakukan pemerintah kemudian ditutup dengan sumber daya yang ada di masyarakat. Di dalam konteks Rohingya tersebut, muncul sinergi yang luar biasa antara pemerintah dengan *civil society* yang ada.

MILESTONE PROGRAM

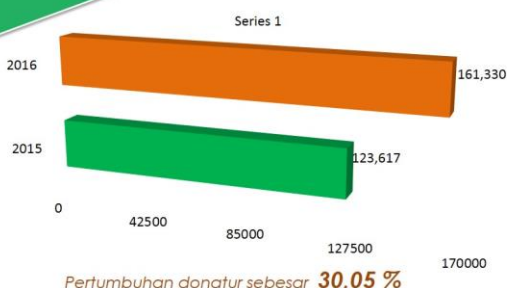


1994	THK	2009	ZM, SGI
1999	PSI, IMZ	2010	DMC, MI, Sekolah Al Syukro Universal
2000	KMM	2011	SSC
2001	LKC	2012	RS. RST, Cordofa, BARZAH
2003	Beastudi Etos	2013	Kampus Bisnis UU
2004	LPM, SMART EI, Makmal Pendidikan	2015	IDEAS, PBH, PBAK, SFR, KWJ
2005	KTN, IK, TWI	2016	RS AKA Medika Sribhawono, Diaspora Development, DayaMart

PENGHIMPUNAN 2012 - 2016



PERTUMBUHAN DONATUR 2015 - 2016



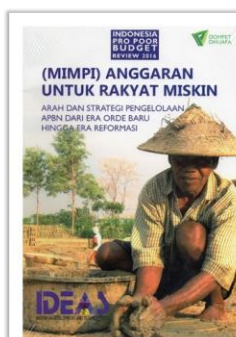
PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN



- *Growth* lembaga-lembaga sosial di Negara kita sedang mengalami stagnasi, yang dulunya tumbuh sekitar 30-50%, hari ini mulai melambat. Masih tetap tumbuh tetapi melambat. Karena apa? Ada beberapa hal yang terkait dengan regulasi pemerintah yang terlalu banyak mengatur, menguatnya *crowd funding* di Negara kita, dan lain-lain.
- Dompot Dhuafa adalah lembaga yang disumbang secara *retail*, eceran, namun jumlah orangnya banyak sekali. Ini adalah salah satu kekuatan dalam filantropi, satu kekuatan dalam menuntaskan SDGs. Coba bayangkan apabila lembaga sosial hanya disumbang oleh satu saja *private sector*, misalnya perusahaan di Negara kita ini, 300 miliar selesai. Betapa sangat tidak fleksibelnya, teman-teman di Dompot Dhuafa berjumlah sekitar seribu orang karyawannya untuk mendesain, memprogram, dan menjalankan program-program.



ADVOKASI KEBIJAKAN



- Program pengentasan kemiskinan yang dikaitkan dengan SDGs, Dompot Dhuafa masih ada di empat pilar SDGs: ekonomi, pendidikan, pengembangan sosial, dan kesehatan. Namun, hari ini kesehatan adalah program yang paling banyak menyalurkan dana masyarakat.
- Total penerima manfaat di 2016 sebanyak 385.537 jiwa. Di tahun 2013, Dompot Dhuafa juga menggagas program kesehatan cuma-cuma, tahun 2010 membuat rumah sakit type C dengan 100 *bed*. Sampai hari ini ada lima rumah sakit yang dikelola berbasis wakaf, bangunannya wakaf, dan dijalankan dengan mekanisme apabila pasien yang ada di situ bukan penerima bantuan BPJS, maka jika ia miskin, ia berhak atas zakat dari Dompot Dhuafa.
- Program pendidikan memiliki total penerima manfaat sebanyak 185.484 jiwa. Pendidikan adalah salah satu program yang drajat pengentasan kemiskinannya sangat tinggi, namun mahal.
- Apabila kita memberikan bantuan ekonomi kepada seratus orang, barangkali hanya 20 yang lepas dari kemiskinan. Namun apabila kita memberikan beasiswa kepada 100 orang, *insyaallah*, 90% lepas dari lingkaran kemiskinan. Di 2016, ada gagasan baru tentang *School for Refugee* (SFR). Tidak banyak lembaga-lembaga Islam di Indonesia yang konsen kepada isu-isu pengungsi. Padahal ada banyak sekali pengungsi yang datang di Negara kita terutama sejak Rohingya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap anak-anak ini ketika tidak bisa akses ke sekolah publik? Tidak bisa masuk SD negeri padahal mereka harus sekolah 5-10 tahun untuk menunggu penempatan ke Australia dan sebagainya. Maka kita bantu mereka untuk dapat bersekolah.
- Program ekonomi adalah yang paling cepat menuntaskan kemiskinan. Namun butuh biaya besar dan tingkat keberhasilannya sementara ini masih di bawah program pendidikan. Contohnya adalah pengupas kerang hijau di Kupang, mereka kebanyakan ibu-ibu dan suami mereka kami berikan bantuan 40 juta. Mereka langsung terentaskan dari kemiskinan, yang tadinya satu setengah juta penghasilannya per bulan, sekarang sudah bisa lima juta. Sudah konkret, namun butuh dana besar. Tingkat kegagalan program ini juga tinggi apabila tidak diiringi dengan pendampingan.



- Di tahun 2010, Dompot Dhuafa membuat divisi advokasi karena sadar bahwa *civil society* tidak dapat menyelesaikan kemiskinan sendiri-sendiri dan pemerintah punya kekuatan yang sangat besar, maka pemerintahlah yang seharusnya bertanggung jawab.

- Pemerintah itu hukumnya wajib, *civil society* sunnah. Maka tempatkan yang wajib itu, ingatkan, supaya mereka menjalankan fungsinya. Membangun satu rumah sakit itu butuh biaya 40 miliar waktu itu di luar tanah, dan satu tahun menelan biaya 35 miliar. Betapa *effort* yang luar biasa kami keluarkan tapi pemerintah membuat 1000 rumah sakit sangatlah mudah dengan kekuatan fiskalnya.
- Maka kembalikan fungsi kita sebagai pemberi contoh saja, ini *role model*-nya, lembaga recehan seperti Dompot Dhuafa yang kantornya di ruko, bisa membuat rumah sakit gratis, bisa memberi beasiswa, masa pemerintah tidak bisa? Cukup sampai di situ saja, jangan mimpi kita bikin 1000 rumah sakit, kita mengambil alih peran pemerintah itu namanya. Cukup menjadi *shadow government* saja.
- Sebaran program Dompot Dhuafa ada di 34 provinsi dan 5 cabang di luar negeri (Korea, Jepang, Australia, Amerika, dan Hong Kong). Namun untuk menebarkan filantropi khas Negara kita, tidak bisa meng-*grab* masyarakat setempat. Jadi donator di negara-negara tersebut masih orang-orang Indonesia. Tapi mimpi Dompot Dhuafa suatu saat, mereka di negara-negara tersebut bisa *campaign* dan bersentuhan dengan isu-isu yang sifatnya universal termasuk dari negara mayoritas Islam seperti Indonesia. Intinya adalah agar merah putih berkibar di luar negeri melalui gerakan filantropi ini.



SESI DISKUSI & TANYA JAWAB

1. Sapto

Pertanyaan : Saya dari salah satu konsultan pengembangan ekonomi lokal, asosiasi penerima beasiswa Amerika, saya adalah checker DIY dan Jateng yang menjadi *concern* kami adalah Dompot Dhuafa bersama Mbak Hapsari, munculnya Donald Trump terhadap SDGs sekarang ini terkesan Amerika mulai cuek. Pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi isu ini karena pola di Indonesia mulai mencontoh, tapi kalau terlalu over atau berlebih sehingga *community* menjadi degradasi kembali, kira-kira bagaimana kedepannya karena saya mendampingi beberapa komunitas?

Jawaban :

- Jika bicara mengenai masyarakat global, *tension* antara negara dan masyarakat, negara ada karena *concern* dari masyarakat, *civic activism*, bukan justru dari seberapa lama jangka waktu dari pemilu, *leadership*, bukan pada orang nya tapi yang harus digaris bawahi adalah idenya. Ide lebih *long lasting* daripada tokoh. Apabila ingin melihat secara politik, masa depan kita akan hancur, karena dunia politik tidak akan ada habisnya. Jadi saran saya, fokus pada ide, karena ini lebih *long lasting* buat kita.
- Secara kapasitas, civil society itu mustahil dapat menyaingi kekuatan fisik suatu negara. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah apabila civil society bersaing dengan civil society lainnya.
- Pak Timo: saya rasa kita biarkan saja Donald Trump. Di tingkat forum global Amerika, ternyata beberapa gubernur di Amerika melakukan presentasi dengan baik hingga seolah-olah tidak mempedulikan yang Donald Trump katakan. Di sana, pemerintahan berjalan di Negara bagian masing-masing. SDGs tidak tergantung *leader*-nya. Kita bisa apa, ambil peran. Intinya *localizing*.

2. Yasid

Pertanyaan : Di era zaman Milinial ini, globalisasi seharusnya memberikan dampak positif, justru malah yang terlihat adalah masyarakat ingin segala macam hal untuk instan, salah satu program pemerintah adalah untuk mendorong dalam segi ekonomi. Bagaimana cara mengkorelasi program pemerintah di tengah masyarakat yang seperti itu untuk meningkatkan ekonomi?

Di Gunung Kidul memiliki salah satu hasil pertanian yang cukup terkenal yaitu singkong tapi di pinggiran Gunung Kidul masih memiliki permasalahan gizi yang buruk cukup tinggi, terkait dengan SDGs 2, 3 mengenai sumber pangan.

Sejauh mana kah strategi pemerintah dalam memanfaatkan hasil lokalnya terutama dalam mengatasi SDGs nomor 2, 3?

Jawaban :

- Kita paham untuk mencapai tujuan program pembangunan yang *sustain* pasti membutuhkan obrolan yang cukup panjang, bahkan rancangan yang sudah dibuat dapat di revisi lagi dan lagi. Mengenai instan atau tidak instan itu sebenarnya tidak bisa kita tentukan sekarang, ini merupakan salah satu negosiasi yang dilakukan di *grassroot* itu sendiri.
- Permasalahan gizi ada dua yaitu gizi lebih dan gizi kurang. Berlebih dan berkurang. Ini diakibatkan oleh pola makan yang tidak seimbang. Maka ada gerakan yang dinamakan pola makan beragam, bergizi, dan berimbang. Hal inilah yang harus diterapkan di masyarakat. Belum tentu Gunung Kidul kekurangan gizi karena sumber proteinnya yang kurang, barangkali pola konsumsinya yang perlu diatur. Begitu pula di kota, *nuwun sewu*, pola konsumsi kita salah jadi kita menjadi kelebihan protein, kelebihan gizi. Ini juga bermasalah bagi kesehatan.

3. Reno Anugrah (UIN Sunan Kalijaga)

Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk filantropi modern? Berhubung mata kuliah saya Filantropi Islam, saya ingin menanyakan bagaimana sejarah Dompot Dhuafa terutama di masa awal menggerakkan filantropi Islam?

Untuk Pak Timotius, dari berbagai *sustainable goals* ini, bidang apa saja yang paling sering bekerja sama terutama dengan kampus yang memiliki jurusan kesejahteraan sosial?

Jawaban :

- Di Dompot Dhuafa, *alhamdulillah* input SDM-nya bagus karena dulu di lembaga zakat mencari SDM itu susah. Tahun-tahun 90-an, jika orang itu kerja jadi amir zakat, ditanya sama calon mertuanya, kerja di mana? Jadi amir zakat, pasti nggak diterima. Hari ini, kita banyak anak-anak aktivis, ketua BEM, yang bekerja di Dompot Dhuafa. Artinya anak-anak tidak suka dengan dinamika politik, tidak suka kerja di kantor, jadi aktivis, maka melanjutkan di sini (Dompot Dhuafa). Banyak SDM berasal dari UI, IPB, UGM. SDM dan inovasi tidak boleh sama dengan yang lain. Lainnya adalah nilai-nilai, Dompot Dhuafa meskipun lembaga zakat, namun ia ada di tengah. Kami mengkomunikasikan nilai-nilai Islam lebih universal.
- Prinsip SDGs adalah *localizing*, jadi akhirnya *goal* itu tidak bisa kita dikte, kita tentukan organisasi ini harus ini dan organisasi itu harus itu. Kembali, apa yang harus dilakukan dari wilayah tersebut. Harusnya di sini peranan akademisi di semua sektor bisa karena Filantropi Indonesia banyak pula bekerja sama dengan kampus terkait beberapa bagian karena hamper setiap daerah itu perlu riset. Ada 4 *platform*, salah satunya adalah akademisi dan pakar. 241 indikator itu tidak mudah, banyak yang datanya juga belum ada. Di sinilah peranan akademisi untuk mencoba dari *goal-goal* yang masih awang, bagaimana bisa disentuh. Belum tentu juga daerah satu dengan daerah lainnya sama. Jadi ini peluang untuk para akademisi.

4. Afif (UNY, asal Demak)

Pertanyaan : Fokus di empat bidang, pertama di bagian pembangunan sosial, ekonomi, dan pembangunan negara. Saya hanya ingin bercerita mengenai fenomena di daerah saya dan bagaimana solusi mengatasinya. Di daerah pesisir Demak, bencana alam terjadi sangat cepat. Di tahun 2003, warga pesisir masih bisa menanam padi, dan sebagainya. Di tahun 2005, air laut masuk dan mata pencaharian masyarakat berubah dari petani menjadi petambak. Kemudian di tahun 2013, abrasi mulai masuk menjadikan wilayah petambakan jadi lautan.

Pertama, ke Bapak Timotius, bagaimana menurut Bapak, jika kondisi wilayah seperti itu, wilayah pengelolaan air perusahaan jika kita mau jadikan air bersih ternyata sudah asin. Solusi dari pemerintah adalah mengambil air tanah, namun jika mengambil air tanah, terjadi penurunan tanah sekitar 10-13 sentimeter per tahun. Di demak dengan ketinggian 2,5 meter dari permukaan air laut dan penurunan tanah sekitar 10-13 sentimeter, maka bisa dikatakan Demak di titik nol diantara 30 tahun lagi. Menurut Pak Timotius, solusi apa yang bisa dilakukan dan mitra mana yang bisa digandeng?

Untuk Bapak Abu Yazid, wilayah yang sudah berubah dari daratan menjadi lautan direncanakan menjadi kawasan industri. Awal luas kawasan industri di Demak hanya 600 hektar kemudian di wacana baru dirubah menjadi 6600 hektar. Ini menjadi masalah baru jika pemerintah tidak bisa memberikan sumber air bersih sehingga mengakibatkan penurunan air tanah. Bagaimana menurut anda, wilayah saya dapat mencari solusinya terutama dalam hal supremasi hukum?

Untuk Ibu Hapsari, ada satu kecamatan di Demak yang mengalami perubahan pola profesi masyarakat karena kaget dengan perubahan budaya. Awalnya petani menjadi petambak, sekarang sudah hilang. Mereka bingung akan bekerja apa? Perusahaan di Demak banyak, namun CSR entah ke mana larinya. Mohon bantuannya karena saya dan teman-teman di Demak sudah beberapa kali advokasi namun masih mental.

Jawaban :

- **Pak Timotius:** Masalah mengenai air tanah dialami di hampir semua wilayah di Indonesia. Hal itu juga berkaitan dengan *climate change*. Solusi yang bisa diberikan adalah teknologi. Jika kita melihat *goal* keenam itu terkait dengan air. Awalnya *goal* keenam masuk dalam ekonomi karena akses distribusi, kemudian dirubah ke lingkungan karena ada aspek konservasi air. Sebagai warga, kita juga harus hemat. Selama air itu dipakai seenaknya, sama saja.
- **Pak Abu:** Ini adalah masalah mengenai perubahan mata pencaharian. Hal seperti ini memang butuh pendampingan dari pemerintah. Hal inilah yang juga terjadi di DIY, yang dulunya di selatan banyak yang bertani, kemudian menjadi nelayan. Oleh karena itu secara konkret, pendampingan dapat dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- **Ibu Maharani:** Saya terlalu gegabah jika menjawab solusinya apa sekarang, namun saya lebih mengarahkan untuk kembali ke komoditas lokal di sana. Ini bukan bencana, namun krisis, bisa dilihat mengganggu masa depan namun bisa juga dilihat sebagai peluang. Temukan ide yang bisa didiskusikan antar kelompok lokal sehingga dapat menjadi aksi kolektif. Sedangkan menanggapi ada SCR atau tidak, saya rasa CSR ini

persoalan sumber daya, namun idenya yang paling penting. Jika ada sumber daya, namun tanpa ide, tentu tidak akan menimbulkan dampak.

- **Pak Sabeth:** di filantropi, sesuatu yang dijual bukan barang, namun ide, gagasan, program. Itu yang perlu dilesakkan ke pikiran-pikiran orang yang membuat tadi. Namun, tidak bisa tidak tanpa komunikasi pula. Tanpa program, juga mustahil. Kami pernah *research* mengenai dorongan berderma di Indonesia, 90% orang berderma karena masalah agama. Maka lembaga agama lah yang harus merubah *mindset* itu karena jika semua orang *standing point*-nya di situ terus, maka mengkreasikan program agak susah. Intinya adalah komunikasi, punya program, keunikan program yang dijual.
- **Mbak Reky:** Di Hoshizora, kami memetakan cara *fundraising* dan mencari mitra yang bisa menangani hal-hal lainnya. Jika di bidang psikologi pendidikan anak, terlihat (di gambar) bahwa anak menjadi pusatnya. Hoshizora fokus pada pendampingan dan pengembangan, dan peningkatan kualitas anaknya, namun kita memahami jika kita ingin mendidik anak, orangtuanya, lingkungan, sekolah, dan masyarakat tidak didampingi, kita akan menghadapi masalah yang sama. 10 tahun yang lalu ketika saya kuliah di Jepang, masalah kita adalah akses pendidikan. Kini, masalah masih sama. Bagaimana kita merubah ini menjadi *systemic change*? Yang kita lakukan adalah melakukan pendampingan kepada anak-anaknya contohnya ketika kami pendampingan di Flores, kami menggandeng partner untuk memberikan pendampingan pada ibu-ibunya untuk mendapatkan penghasilan sendiri, jadi kita berkolaborasi dengan *social enterprises* lain yang memberikan pendampingan pada orangtua, kemudian kita menggaet SCR dari perusahaan lain untuk membantu kita mendampingi sekolah dan guru. Kita juga *engage* pemerintah. Jika dilihat, program ini bagus, *budget*-nya besar sekali, nggak mungkin dong? Tapi dengan adanya kolaborasi tersebut, semua orang punya porsi. Kemudian hal ini bisa *sustainable*, kita bisa melihat dampak di wilayah tersebut satu, dua, tiga tahun ke depan sehingga setelah wilayah tersebut mapan, kami tidak butuh ada di wilayah tersebut.

5. Asmi (Yayasan Senyum Kita)

Pertanyaan : Yayasan Senyum kita adalah salah satu yang fokus pada bidang pendidikan. Kita memberikan beasiswa, pelatihan tentang pendidikan, pengembangan mereka, nah, mungkin dari anak-anaknya bisa berkembang, namun dari orangtuanya jika tidak diadvokasi juga, nanti akhirnya tidak akan sejalan. Bagaimana kemudian yayasan saya bisa bekerja sama dengan yayasan di bidang yang lain?

Kedua untuk Bapak Abu Yazid, SDGs ini bukan hanya berbicara mengenai mengubah dunia menjadi lebih baik, namun juga bagaimana mencari donatur. Nah, mencari donatur ini bagaimana trik dari Dompot Dhuafa untuk menaikkan jumlah donasi dan donatur?

Jawaban :

- **Pak Abu:** Jika ada pendampingan bagi anak, orangtuanya juga harus didampingi. Jika salah satu yayasan sudah mendampingi anaknya, maka harus ditemukan juga siapa yang mendampingi keluarganya. Di Yogyakarta sudah ada jika anak di jalan, maka orangtuanya karena barangkali anak di jalan itu memang karena terdesak oleh ekonomi

orangtuanya, maka orangtuanya juga harus diadvokasi. Jika ini mau ditemukan bisa saja, difasilitasi oleh pemerintah untuk menemukan antara orang yang membutuhkan dengan orang yang akan menjadi donatur. Namun sekali lagi, ini memberdayakan atau intervensi? Tentu memberdayakan sehingga harus keluar dari *business purpose*.

6. Sofi (Yayasan Sakinah)

Pertanyaan : Yayasan Sakinah fokus pada pendampingan ibu dan anak korban kekerasan. Saya ingin bertanya kepada Dompot Dhuafa bagaimana selama ini teman-teman membangun kemitraan khususnya di wilayah Jogja? Kemudian bagaimana kemudian Dompot Dhuafa bisa mengembangkan unit-unit usaha untuk kemudian meng-cover kebutuhan operasional?

Jawaban :

- Ada dua pola yang dilakukan di lembaga besar filantropi untuk membelanjakan donasinya. Pertama ada hampir semua donasi yang terkumpul digunakan untuk membiayai program yang dibuatnya. Kedua ada pengelolaan untuk organisasi sendiri. Nah, Dompot Dhuafa mengambil *mix* di antara itu. Jadi Dompot Dhuafa membelanjakan untuk program, namun juga mendirikan unit-unit lain yang terpisah. 30% donasi Dompot Dhuafa *pure* masuk ke penerima.
- Anak dan wanita korban kekerasan adalah orang yang berhak atas zakat. Sumber daya memang 50% dari zakat, sisanya dari donasi masyarakat, itu sangat fleksibel.

7. Ida (Perhimpunan Rohana)

Pertanyaan : Perhimpunan Rohana adalah organisasi untuk teman-teman difabel terutama advokasi kebijakan publik mengenai aksesibilitas difabel. Saya ingin menanyakan kepada Pak Sabeth, bagaimana konsen Dompot Dhuafa kepada isu difabel? Kedua kepada Pak Timotius, sejauh mana Filantropi Indonesia sudah bergerak dalam mendukung SDGs yang *support* difabel?

Jawaban :

- **Pak Sabeth:** kemudian gagasan mengenai difabel, sudah muncul di tahun-tahun lalu ketika membangun gedung kantor bagaimana bisa ramah untuk rekan-rekan difabel, kemudian orang-orang yang tuna rungu bisa bekerja di Dompot Dhuafa. Terkait isu ini kami sering bekerja sama dengan badan yang konsen terhadap itu disabilitas.
- **Pak Timotius:** pertanyaan ini sekaligus menjadi catatan kami karena tidak banyak memang dari difabel yang aktif bergabung dalam isu SDGs. Saya sampaikan juga nanti ke Bappenas agar isu SDGs ini juga bisa sampai ke rekan-rekan difabel karena memang perlu waktu. Namun saya setuju *no one left behind*, kita tidak bisa meninggalkan rekan-rekan difabel tertinggal di belakang. Filantropi Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Sosial, itu ada sekian banyak penyandang disabilitas yang masih belum ketemu titik temunya korelasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Ke depannya ini menjadi konsen Perhimpunan Rohana, akan saya bawa untuk bisa di-*follow up*.

KESIMPULAN MODERATOR (REKY MARTHA)

- Masyarakat dunia telah sepakat untuk memenuhi *goal* pembangunan melalui SDGs dengan 17 *goals* dan 241 indikator. Indonesia telah mengsinergikan SDGs kita selaras dengan prinsip universal, integrasi dan *no one left behind*.
- Sedangkan di Yogyakarta, tingkat kemiskinan masih diatas rata – rata, pemerintah daerah mencoba untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun gap kemiskinan di Indonesia masih sangat besar, kekayaan yang tidak merata, dan ketimpangan – ketimpangan lainnya. Jadi kita tentunya harus ikut turun serta, tidak hanya pemerintah yang memiliki andil dalam permasalahan ini. Jadi, ide, kesadaran dan melakukan perubahan, tidak hanya diserahkan kepada pemerintah, namun hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab kita.
- Kita harus mulai bertanya, kritis dan sadar dalam berbagai hal, siapa yang sebenarnya layak untuk kita bantu, apakah kita mulai inklusif untuk semua, siapa yang butuh dibantu, organisasi seperti apa yang tentunya akan memberikan perubahan kesadaran *long term*. Tentunya terdapat banyak kesempatan kedepannya lagi untuk bersinergi lagi antara pemerintah dengan *best practicess* untuk berbagi ilmu dan maju bersama untuk melakukan perubahan dalam SDGs dan saling belajar.
- Setelah acara ini, coba lah mulai beratanya – tanya, atau *take home questions* dari presentasi ini, *brainstorm* mengenai bagaimana kaum milenial bisa berkontribusi, apakah menggunakan *platform* tertentu, atau bagaimana kah cara nya yang dapat kita temukan dari kita sendiri.
- Apakah teman – teman sudah bertanya kepada group, kelompok dan organisasi atau asosiasi teman – teman, intensinya melakukan seperti apa, sinergi dengan pemerintah seperti apa.
- Mulailah berdiskusi hal tersebut kemasyarakat dan juga *research*, dimana hal ini merupakan salah satu hal yang saya *highlight* pada hari ini. Kita memiliki *open acsess research* bisa lewat google. Kita bisa belajar melalui 241 indikator SDGs tersebut, apakah yang dikatakan sudah *in one line*.